



PERAN POLRI DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KEAMANAN MASYARAKAT SECARA HOLISTIK

Muh Bambang Taufik¹, Andi Muh. Taqiyuddin BN²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

STAI Al-Azhar Gowa²

✉ corresponding author email: ridwanalserawi@gmail.com

Received: 23/11/2024

Accepted: 26/11/2024

Published: 29/12/2024

Abstract

This research aims to examine the role of the Indonesian National Police (POLRI) in promoting holistic social development and community security. Polri's responsibilities are not only limited to law enforcement, but also include community development in social, educational and welfare aspects. The research method used is a qualitative approach with case study analysis of Polri initiatives in various community partnership programs in several regions. The results show that Polri plays an active role in increasing community participation through programs such as entrepreneurship training, counseling on the law, and involvement in social activities. In addition, Polri also serves as a mediator in resolving social conflicts that arise in the community. By strengthening the relationship between the police and the community, a safer and more conducive environment is created, as well as creating public trust in the police institution. Therefore, a more integrated and sustainable strategy is needed to strengthen Polri's role in creating inclusive and sustainable social development. This research is expected to provide

recommendations for police policies to further optimize their role in society.

Keyword: *Holistics; Community Security; Social Development; Role Of The Police*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Holistik; Keamanan Masyarakat; Pembangunan Sosial; Peran Polri*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan suatu bangsa, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak hanya bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam aspek sosial dan pembangunan masyarakat secara lebih luas. Dengan tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan angka kriminalitas, perpecahan sosial, dan masalah ekonomi, diperlukan pendekatan yang holistik untuk mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan. Sebagai contoh, naiknya angka kriminalitas yang terjadi di Jakarta naik 2% pada tahun 2024 dari tahun 2023, yakni sejumlah 58.055 kejahatan dari jumlah kasus sebelumnya sebanyak 57.157 kejahatan.¹ Begitupula halnya yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Polri, sebagai institusi yang memiliki jangkauan luas di seluruh daerah, memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan yang melibatkan masyarakat.² Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama yang perlu dioptimalkan oleh Polri untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

Peran Polri dalam pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam menjaga keamanan. Keamanan yang terjamin mempengaruhi iklim investasi, interaksi sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Polri perlu mengadopsi strategi yang melibatkan kolaborasi dengan masyarakat dalam

¹Dinda Aulia, *Kriminalitas di Jakarta Naik di 2024, Penyelesaian Kasus Justru Menurun*, artikel online, <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 08 Desember 2024

²Angga Indarta, *Smart City Dalam Pendekatan Pemolisian Sebagai Bagian Dari Smart Policing*, (Jakarta: Sespim Polri, 2024), h. 35

penanganan isu-isu sosial dan keamanan.³ Program-program seperti kegiatan sosialisasi hukum, pelatihan keterampilan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial diharapkan mampu meningkatkan hubungan positif antara Polri dan masyarakat. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, akan tercipta sinergi yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran Polri dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian mengenai "Peran Polri dalam Mendorong Pembangunan Sosial dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik," metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena sosial yang kompleks, yaitu interaksi antara Polri dan masyarakat

³Heru Kusmanto, SE., MM, Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 25, Maret 2016

dalam konteks pembangunan sosial dan keamanan.⁴

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana Polri menjalankan perannya melalui berbagai program kemitraan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen,⁵ yang memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan konteks dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Polri.

Analisis studi kasus menjadi metode yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada beberapa daerah tertentu yang menjadi lokasi program kemitraan masyarakat oleh Polri. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus yang spesifik, peneliti dapat merinci berbagai strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang timbul dari interaksi antara Polri dan masyarakat. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan ini memberikan peluang untuk memahami bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi pelaksanaan program-program kemitraan. Data yang diperoleh dari studi kasus tersebut dapat dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, tema, dan *best practices* yang dapat diadopsi oleh Polri dalam upaya meningkatkan efektivitas

⁴Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, h. 2896-2910 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023

⁵Muhammad Rudi Syahputra, Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* . 1, 2 (Dec. 2024). DOI:<https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>

program pembangunan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran Polri dalam pembangunan sosial dan keamanan masyarakat. Dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari program kemitraan yang berhasil, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak Polri dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif, tetapi juga bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Diharapkan, dengan pendekatan holistik yang mengaitkan aspek sosial dan keamanan, Polri dapat lebih optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi pembangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model kerjasama yang lebih inklusif antara Polri dan masyarakat, sehingga menciptakan sinergi yang positif dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bersama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik

Peran Polri dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik dapat dilihat melalui berbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hasil yang menonjol adalah keberhasilan program kemitraan Polri dengan masyarakat dalam menangani isu-isu kriminalitas dan penguatan komunitas. Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa daerah, misalnya, ditemukan bahwa program Community Policing (Polisi Berbasis Masyarakat) berhasil meningkatkan kepercayaan

masyarakat. Dalam model ini, Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pihak kepolisian. Dengan adanya pola interaksi yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melaporkan tindak kriminal, sehingga memperkuat sistem pencegahan.⁶

Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Polri juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendidikan hukum, dan program pembinaan generasi muda, Polri berhasil memberdayakan individu dan komunitas untuk menjadi lebih mandiri dan produktif. Misalnya, dalam satu program pelatihan kewirausahaan, peserta diberikan latihan tentang manajemen bisnis dan pemasaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah peserta mampu mendirikan usaha baru dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas, karena masyarakat yang sejahtera cenderung lebih stabil dan terhindar dari tindakan kriminal.⁷

⁶Heru Susetyo, 'Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional', *Lex Journalica*, 6.1 (2008), 45.

⁷Marthsian Yeksi Anakotta, 'Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Continuing the Development of the Indonesian National

Selanjutnya, ada juga upaya Polri dalam menangani konflik sosial yang sering kali menjadi pemicu ketidakamanan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, Polri berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antarkelompok atau individu. Pendekatan restoratif yang diterapkan oleh Polri dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam penyelesaian sengketa terbukti efektif dalam meredakan ketegangan yang ada. Data dari hasil kajian menunjukkan bahwa kasus konflik yang dikelola melalui mediasi oleh Polri memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi untuk mencapai kesepakatan dibandingkan kasus yang dibawa ke ranah hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Polri dalam peran mediasi tidak hanya meredakan konflik tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dialog dan selesainya masalah secara damai.⁸

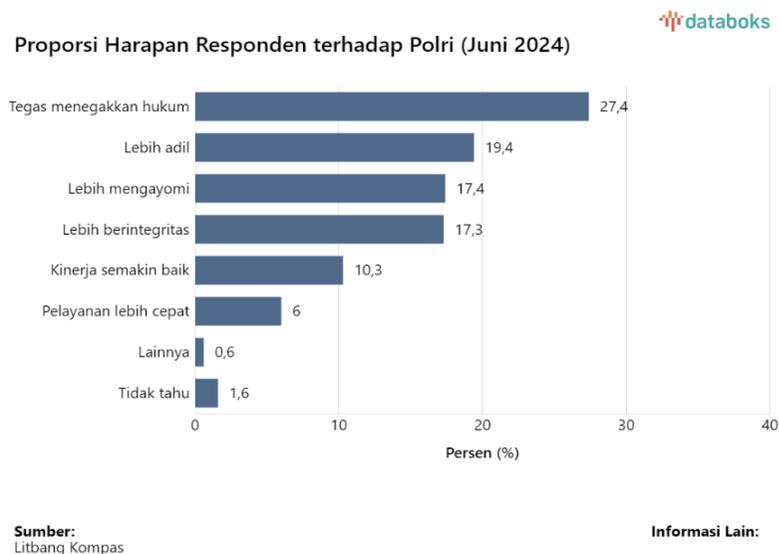
Namun, tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat tidak bisa diabaikan. Sebagian masyarakat masih memandang Polri dengan skeptis, mengingat sejarah panjang masalah kepercayaan publik yang mengarah pada stigma negatif.⁹ Tindakan represif dalam penegakan hukum, kasus korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh oknum kepolisian masih menjadi isu

Security System within the Framework of Countering Terrorism Legal System)', VI.1, 41–71.

⁸Jefri Rafael Sikumbang and Tugimin Supriyadi, 'Fenomena Kenakalan Remaja: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Kriminal', *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2.5 (2024), 1–8 <<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>>.

⁹Hidayat Salam, *Perkuat Pijakan Moral dan Integritas Polri*, artikel online, September 2023, www.kompas.id, diakses pada 09 Desember 2024

yang menghambat hubungan positif antara Polri dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari institusi kepolisian untuk melakukan reformasi internal, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Ulasan publik secara rutin tentang kegiatan Polri serta ketersediaan layanan pengaduan bagi masyarakat juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan tersebut.¹⁰



Gambar 1. Proporsi Harapan Responden terhadap Polri (Juni 2024)

Polri telah merayakan ulang tahun ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024. Dalam rangkaian acara tersebut, Litbang Kompas

¹⁰Mukidi Mursal, Ibnu Affan, 'Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)', 3.4 (2024), 413–46.

mengungkapkan berbagai harapan masyarakat terhadap Polri. Hasil survei menunjukkan bahwa 27,4% responden menginginkan Polri untuk lebih tegas dalam penegakan hukum. Sementara itu, 19,4% responden berharap agar Polri dapat menunjukkan sikap yang lebih adil. Stigma yang mengatakan bahwa sikap adil Polri baru terlihat setelah kasus tertentu mendapat perhatian masyarakat dan viral di media sosial harus diatasi oleh institusi ini.¹¹

Terdapat juga 17,4% responden yang berharap Polri bisa lebih mengayomi, sedangkan 17,3% berharap Polri memiliki integritas yang tinggi dan sikap lebih profesional. Di sisi lain, 10,3% responden berharap agar kinerja Polri dapat ditingkatkan, 6% ingin agar pelayanan Polri dilakukan lebih cepat, dan 0,6% memiliki harapan lain. Penting untuk mempercepat reformasi kultural guna mencapai visi Polri Presisi, yang didukung oleh solidaritas seluruh anggota korps, demi memenuhi tantangan dan harapan masyarakat.

Perlu dicatat bahwa pembangunan sosial dan keamanan bukan merupakan tanggung jawab Polri semata. Masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Kolaborasi yang baik antar lembaga dan elemen masyarakat dapat menciptakan sinergi yang optimal untuk meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh

¹¹ Nabilah Muhamad, 'Proporsi Harapan Responden Terhadap Polri, Usia Makin Tua, Polri Diharapkan Makin Tegas Dan Adil', *Databoks*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2d7efaaf22bf4d0/usia-makin-tua-polri-diharapkan-makin-tegas-dan-adil>>.

Polri. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki komunitas yang kuat dan partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam program-program pembangunan, cenderung memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.¹²

Dalam konteks ini, pendidikan dan sosialisasi menjadi aspek penting. Polri perlu melakukan pendidikan hukum dan kesadaran sosial secara berkelanjutan kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta informasi mengenai sistem hukum dan cara melaporkan kriminalitas, dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Selain itu, program-program edukatif di sekolah dapat membantu menumbuhkan budaya hukum sejak dini kepada generasi muda, sehingga mereka memahami pentingnya peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.¹³

Menghadapi era digital yang semakin berkembang, Polri juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tindakan kriminal kini banyak yang terjadi di dunia maya, sehingga Polri perlu memiliki unit khusus yang menangani kejahatan siber. Pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian terkait teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting agar mereka

¹²Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, 'Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 359–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>>.

¹³Zulham and Taufik Siregar, 'Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika)Studi Pada POLRESTA Pematangsiantar)', *Mercatoria*, 3.1 (2010), 58–70.

mampu menanggapi dan mengatasi kejahatan yang muncul dari perkembangan teknologi. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi dengan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak kriminal.¹⁴

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Polri memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Melalui program-program yang terintegrasi dan kolaboratif, Polri dapat membangun kepercayaan masyarakat, memberdayakan komunitas, serta menjembatani konflik sosial. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya komitmen berkelanjutan dari semua elemen, baik dari Polri itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Dengan sinergi yang baik dan pendekatan yang holistik, diharapkan tercipta suatu masyarakat yang tidak hanya aman tetapi juga sejahtera.¹⁵

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Polri memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat melalui mediasi

¹⁴ Khaerul Ardhian Syaekh Tama ,Wiraga Dimas, 'Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Pasrtisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Di Wilayah Hukum Polres Blora', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020), 408–20.

¹⁵ thomas Agung Kurnianto, 'Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.1 (2021), 11 <<https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>>.

dan pencegahan konflik. Meskipun menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik, reformasi internal, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan efektivitas peran Polri. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan media sosial juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan modern. Sinergi antara Polri dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Implikasi yang dapat diambil dari artikel ilmiah mengenai peran Polri dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik adalah pentingnya meningkatkan kolaborasi antara Polri dan berbagai elemen masyarakat. Polri sebaiknya mengembangkan program-program kemitraan yang melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektoral lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Melalui pendekatan partisipatif ini, setiap kelompok masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam identifikasi masalah serta pencarian solusi, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan pembangunan sosial.

Selain itu, Polri juga perlu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada keterampilan komunikasi, mediasi, dan pemahaman konteks sosial-ekonomi Masyarakat Penerapan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan juga harus diperkuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas Polri. Dengan

mengintegrasikan semua elemen ini, diharapkan Polri dapat menjalankan perannya secara lebih komprehensif dalam mendorong pembangunan sosial dan menciptakan keamanan masyarakat yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Anakotta, Marthsian Yeksi, 'Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Continuing the Development of the Indonesian National Security System within the Framework of Countering Terrorism Legal System)', VI.1, 41–71
- Angga Indarta, *Smart City Dalam Pendekatan Pemolisian Sebagai Bagian Dari Smart Policing*, Jakarta: Sespim Polri, 2024
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono, 'Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 359–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>>
- Heru Susetyo, 'Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional', *Lex Jurnalica*, 6.1 (2008), 45
- Hidayat Salam, *Perkuat Pijakan Moral dan Integritas Polri*, artikel online, September 2023, www.kompas.id
- Kurnianto, Thomas Agung, 'Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.1 (2021), 11 <<https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>>
- Marinu Waruwu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, h. 2896-2910 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
- Mursal, Ibnu Affan, Mukidi, 'Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)', 3.4 (2024), 413–46

- Nabilah Muhamad, 'Proporsi Harapan Responden Terhadap Polri, Usia Makin Tua, Polri Diharapkan Makin Tegas Dan Adil', *Databoks*, 2024
<<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2d7efaaf22bf4d0/usia-makin-tua-polri-diharapkan-makin-tegas-dan-adil>>
- Sikumbang, Jefri Rafael, and Tugimin Supriyadi, 'Fenomena Kenakalan Remaja: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Kriminal', *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2.5 (2024), 1–8
<<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>>
- Tama ,Wiraga Dimas, Khaerul Ardhan Syaekh, 'Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Pasrtisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Di Wilayah Hukum Polres Blora', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020), 408–20
- Zulham, and Taufik Siregar, 'Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukun Terhadap Kejaharan Psikotropika)Studi Pada POLRESTA Pematangsiantar)', *Mercatoria*, 3.1 (2010), 58–70
- Dinda Aulia, Kriminalitas di Jakarta Naik di 2024, Penyelesaian Kasus Justru Menurun, <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 08 Desember 2024
- Heru Kusmanto, SE., MM, Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 25, Maret 2016
- Muhammad Rudi Syahputra, Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* . 1, 2 (Dec. 2024). DOI:<https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>